BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.1 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.2 Perancangan

Menurut Azhar Susanto (2004:332) yang dimaksud dengan Perancangan dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya adalah sebagai berikut: "perancangan adalah spesifikasi umum dan terinci dari pemecahan masalah berbasis komputer yang telah dipilih selama tahap analisis". Menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005:51) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi menyatakan bahwa: "perancangan adalah kemampuan untuk membuat beberapa alternatif pemecahan masalah".

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat memberikan simpulan bahwa perancangan adalah kemampuan membuat alternatif untuk memecahkan masalah yang berbasis komputer selama tahap analisis.

2.1.2 Sistem

Definisi sistem menurut pernyataan Jogiyanto HM (2005:1) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain adalah sebagai berikut: "sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu".

Definisi sistem menurut Mulyadi (2001:5) dalam bukunya Sistem Akuntansi "sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan pokok perusahaan". Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat memberikan simpulan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja yang saling berhubungan dan bersama-sama melakukan kegiatan perusahaan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

2.1.3 Informasi

Definisi informasi menurut pernyataan Jogiyanto HM (2005:8) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain adalah sebagai berikut: "informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya". Menurut Witarto (2004:9) dalam bukunya Memahami Sistem Informasi menjelaskan bahwa: "informasi adalah rangkaian data yang mempunyai sifat sementara, tergantung dengan waktu, mampu memberi kejutan atau surprise pada yang menerimanya". Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat memberikan simpulan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah, mempunyai sifat sementara, serta mempunyai manfaat yang lebih berguna.

Kualitas informasi menurut Hartono (2005:10) dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

"1. Relevan
2. Tepat Waktu
3. Akurat".

2.1.4 Sistem Informasi

Menurut Jogiyanto HM (2005:11) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain menjelaskan bahwa:

> "Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan."

Menurut Witarto (2004:19) dalam bukunya yang berjudul Memahami Sistem Informasi menjelaskan bahwa: "sistem informasi adalah sistem yang berisi SPD (Sistem Pengolahan Data) yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data". Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem pengolahan data dalam suatu organisasi yang bersifat manajerial.

2.1.5 Akuntansi

Definisi akuntansi menurut Soemarso SR (2004:3) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Suatu Pengantar menyebutkan bahwa: "akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut."

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:2) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan yang dimaksud dengan akuntansi adalah sebagai berikut: "akuntansi adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi".

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat mengambil simpulan bahwa akuntansi adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh pengguna informasi.

2.1.5.1 Metode Pencatatan Akuntansi

Metode pencatatan akuntansi yang digunakan adalah metode pencatatan *accrual basis*, maka definisi menurut Abdul Halim (2007:49) penerjemah Sujana Ismaya dalam bukunya Kamus Akuntansi menjelaskan bahwa: "*Accrual Basis Accounting* (akuntansi akrual), yaitu dasar akuntansi yang mengakhiri transaksi dan dasar peristiwa tersebut terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau di bayar".

Menurut Kamus Besar Akuntansi (2004:19) pengertian *Acrual Basis Accounting Method* sebagai berikut:

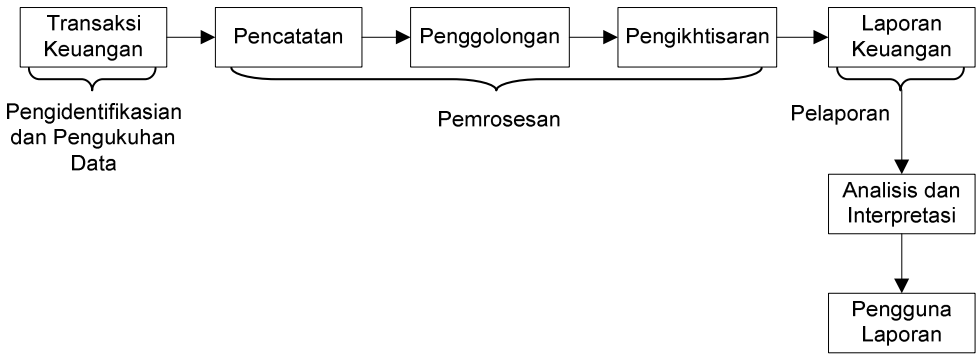
> "*Acrual Basis Accounting Method* (metode akrual) adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan yang dihasilkan baru diakui atau dicatat apabila proses yang menghasilkan lengkap dan apabila transaksi pertukaran terjadi, sementara pengeluaran baru diakui atau dicatat apabila sejumlah uang benar-benar dibayarkan".

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa metode pencatatan *accrual basis* adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan yang dihasilkan diakui apabila transaksi pertukaran terjadi dan peristiwa tersebut terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2.1.5.2 Proses Akuntansi

Definisi menurut Al-Haryono (1997:11) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Akuntansi proses akuntansi adalah sebagai berikut: "Akutansi merupakan suatu proses yang meliputi (1) Pencatatan (2) Penggolongan (3) Peringkasan (4) Pelaporan (5) Penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi". Definisi menurut Waluyo (2008:34) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pajak menerangkan bahwa: "proses akuntansi adalah proses yang terdiri atas kegiatan mengidentifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang bermanfaat dalam penilaian dan pengambilan keputusan manajemen".

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa proses akuntansi adalah proses pengolahan data yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan. Apabila digambarkan, maka siklus akuntansi seperti gambar di bawah ini:



Sumber: (Waluyo, 2008:34, "Akuntansi Pajak")

Gambar 2.1 Proses Akuntansi (*Accounting Process*)

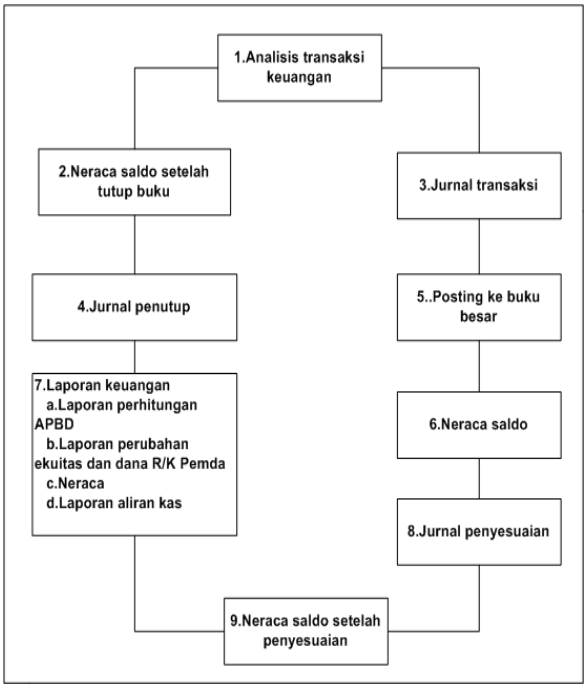
2.1.5.3 Siklus Akuntansi

Definisi menurut Waluyo (2008:35) pada buku Akuntansi Pajak menerangkan bahwa:

> "Siklus Akuntansi adalah kegiatan yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran, data yang relevan untuk pengambilan keputusan, pemrosesan data, pelaporan, dan penginformasian atau pengomunikasian kepada pengguna laporan keuangan".

Menurut Abdul Halim (2007:52) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Pubik Akuntansi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: "siklus akuntansi adalah suatu sistem untuk mengolah *input*an (masukan) menjadi *output* (pengeluaran)".

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa siklus akuntansi adalah proses pencatatan akuntansi yang dimulai dari menganalisis dokumen sampai dengan menghasilkan laporan keuangan. Berikut gambar siklus akuntansi:



Sumber: (Abdul halim, 2007:43 , "Akuntansi Sektor Pubik Akuntansi Keuangan Daerah")

Gambar 2.2 Siklus Akuntansi (*Accounting Cycle*)

Berikut penjelasan masing-masing langkah dalam siklus akuntansi formal:

A. Analisis transaksi bisnis

Transaksi bisnis merupakan kejadian ekonomis yang secara langsung berpengaruh terhadap posisi keuangan atau hasil operasi keuangan.

B. Pencatatan pada buku jurnal

Akuntansi membutuhkan sebuah catatan setiap transaksi bisnis secara kronologis atau urut sesuai dengan tanggal terjadinya.

C. Posting ke buku besar

Posting adalah proses memindahan ayat-ayat jurnal dari jurnal ke akun buku besar. Posting dilakukan secara individual setiap hari atau seminggu sekali.

D. Penyusunan daftar saldo

Sebelum laporan keuangan disusun, saldo dari masing-masing akun harus ditentukan terlebih dahulu. Saldo tersebut dapat dilihat dari buku besar, dan arus dibuktikan persamaan debit dan kreditnya.

E. Penyesuaian

Beberapa akun dalam neraca saldo belum menunujukkan informasi yang *Up To Date* (terkini), karena beberapa informasi baru dapat diketahui pada akhir tahun melalui analisis terhadap keadaan pada akhir periode.

F. Daftar saldo disesuaikan

Setelah penyesuaian dicatat dan diposting ke akun buku besar, neraca saldo disesuaikan disiapkan.

G. Penyusunan laporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan diawali dengan menyiapkan laporan rugi-laba. Laba atau rugi bersih kemudian digunakan untuk menyusun laporan ekuitas pemilik.

H. Penutupan buku besar

Saldo-saldo yang terdapat dalam neraca akan terus dibawa ketahun-tahun berikutnya. Akun neraca mempunyai sifat relatif permanen maka akun ini disebut dengan akun permanen *(Permanent Account)* atau akun riil *(Real Account)*.

I. Daftar saldo setelah penutupan

Setelah proses penutupan buku besar langkah berikutnya adalah mempersiapkan daftar saldo setelah penutupan *(Post Clossing Trial Balance)*.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa siklus akuntansi adalah proses pencatatan akuntansi yang dimulai dari menganalisis dokumen sampai dengan menghasilkan laporan keuangan.

2.1.5.3.1 Jurnal Umum

Definisi jurnal menurut Mulyadi (2001:4) pada buku Sistem Akuntansi menerangkan bahwa: "jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya". Definisi jurnal menurut Djoko Muljono (2006:18) dalam bukunya Akuntansi Pajak menerangkan bahwa: "jurnal adalah catatan asli (*original entry*) dari transaksi keuangan perusahaan yang menunjukan perkiraan apa yang harus di debit dan perkiraan apa yang harus di kredit serta jumlahnya."

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat memberikan simpulan bahwa jurnal adalah catatan transaksi keuangan instansi yang pertama dan digunakan untuk mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

Tabel 2.1 Jurnal Umum Untuk Penyampaian SPOP ke Kecamatan

(Abdul Halim, 2004:36, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…… JURNAL UMUM PERIODE……						
Tanggal		**Kode Rekening**	**Uraian**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**
xxx	x	310601	Piutang PBB Sekecamatan	112	xxx	
		1110109	Pendapatan PBB Sekecamatan	411		Xxx
	Total				**xxx**	**Xxx**

Tabel 2.2 Jurnal Umum Untuk Penerimaan SPOP dari KPP

(Abdul Halim, 2004:36, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…… JURNAL UMUM PERIODE…….						
Tanggal		**Kode Rekening**	**Uraian**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**
xxx	x	310602	Piutang PBB Wajib Pajak	112	xxx	
		1110109	Pendapatan PBB Wajib Pajak	411		xxx
		41114	Utang PBB	211		xxx
	Total				**xxx**	**xxx**

Tabel 2.3 Jurnal Umum Saat Menerima SPOP dari Kecamatan

(Abdul Halim, 2004:36, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…… JURNAL UMUM PERIODE…….						
Tanggal		**Kode Rekening**	**Uraian**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**
xxx	x	211	Beban PBB	511	xxx	
		41114	Utang PBB	211		xxx
	Total				**xxx**	**xxx**

Tabel 2.4 Jurnal Umum Untuk Pembayaran PBB ke Kecamatan

(Abdul Halim, 2004:36, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…… JURNAL UMUM PERIODE…….						
Tanggal		**Kode Rekening**	**Uraian**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**
xxx	x	41114	Utang PBB	211	xxx	
		310101	Kas	111		xxx
	Total				**xxx**	**xxx**

Tabel 2.5 Jurnal Umum Untuk Penerimaan Pembayaran PBB dari Wajib Pajak

(Abdul Halim, 2004:36, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…… JURNAL UMUM PERIODE…….						
Tanggal		**Kode Rekening**	**Uraian**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**
xxx	x	310101	Kas	111	xxx	
		310602	Piutang PBB Wajib Pajak	112		xxx
	Total				**xxx**	**xxx**

Tabel 2.6 Jurnal Umum Untuk Penerimaan Pembayaran PBB dari Kecamatan

(Abdul Halim, 2004:36, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…… JURNAL UMUM PERIODE…….						
Tanggal		**Kode Rekening**	**Uraian**	**Ref**	**Debit**	**Kredit**
xxx	x	12102	Bagi Hasil PBB	412	xxx	
		310101	Kas	111	xxx	
		310601	Piutang PBB	112		xxx
	Total				**xxx**	**xxx**

2.1.5.3.2 Buku Besar Umum

Definisi buku besar menurut Mulyadi (2001:12) dalam bukunya Sistem Akuntansi menerangkan bahwa: "buku besar (*General Ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal". Menurut Soemarso (2004:68) dalam bukunya

Akuntansi Suatu Pengantar definisi buku besar adalah: “buku besar merupakan kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang salin berhubungan dan yang merupakan satu kesatuan tersendiri”. Definisi jurnal menurut Djoko Muljono (2006:20) dalam bukunya Akuntansi Pajak menerangkan bahwa: ”buku besar adalah sekelompok perkiraan yang terdiri dari perkiraan yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa buku besar adalah rekening-rekening yang sebelumnya dicatat di dalam jurnal umum dan merupakan suatu kumpulan perkiraan yang saling berhubungan.

Selain dari buku besar umum, ada pula yang disebut buku besar pembantu. Definisi buku besar pembantu menurut Mulyadi (2001:4) dalam buku Sistem Akuntansi menerangkan bahwa: “buku besar pembantu (*Subsidiary ledger*) terdiri dari rekening-rekening pembantu yang memiliki data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar”. Menurut James A. Hall (2004:73) dalam buku *Accounting Information System* yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary menerangkan bahwa: “buku besar pembantu (*Subsidiary Ledger*) disimpan dalam departemen akuntansi perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa buku besar pembantu adalah data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dibuku besar.

Berikut adalah perkiraan-perkiraan buku besar (*ledger*) tiga kolom menurut Abdul Halim dalam buku “Akuntansi Keuangan Daerah”:

Tabel 2.7 Buku Besar Umum Untuk Kas

(Abdul Halim, 2004:50, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……
BUKU BESAR UMUM
PERIODE……

Nama Rekening: Kas Kode Rekening: 310101

Tanggal	Uraian	Ref.	Debet	Kredit	D/K	Saldo
	Piutang PBB Sekecamatan	112	xxx	-	D	xxx
	Piutang PBB Wajib Pajak	112	xxx	-	D	xxx
	Beban Pajak	511	xxx	-	D	xxx
	Utang Pajak	211	xxx	-	D	xxx
	Kas	111	xxx	-	D	xxx
	Bagi Hasil Pajak	412	xxx	-	D	xxx

Tabel 2.8 Buku Besar Umum Untuk Penyampaian SPOP ke Kecamatan

(Abdul Halim, 2004:50, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……
BUKU BESAR UMUM
PERIODE……

Nama Akun: Penyampaian SPOP ke Kecamatan Kode Rekening: 310601

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	D/K	Saldo
	Pendapatan PBB Sekecamatan	411	-	xxx	K	xxx

Tabel 2.9 Buku Besar Umum Penerimaan SPOP dari KPP

(Abdul Halim, 2004:50, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……
BUKU BESAR UMUM
PERIODE……

Nama Akun: Penerimaan SPOP dari KPP Kode Rekening: 310602

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	D/K	Saldo
	Pendapatan PBB WP	411	-	xxx	K	xxx
	Utang PBB ke KPP	211	-	xxx	K	xxx

Tabel 2.10 Buku Besar Umum Untuk Penerimaan SPOP dari Kecamatan

(Abdul Halim, 2004:50, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……
BUKU BESAR UMUM
PERIODE……

Nama Akun: Penerimaan SPOP dari Kecamatan Kode Rekening: 211

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	D/K	Saldo
	Utang PBB	211	-	xxx	K	xxx

Tabel 2.11 Buku Besar Umum Untuk Pembayaran PBB ke Kecamatan

(Abdul Halim, 2004:50, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……
BUKU BESAR UMUM
PERIODE……

Nama Akun: Pembayaran PBB ke Kecamatan Kode Rekening: 41201

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	D/K	Saldo
	Kas	111	-	xxx	K	Xxx

Tabel 2.12 Buku Besar Umum Untuk Penerimaan Pembayaran PBB dari Wajib Pajak

(Abdul Halim, 2004:50, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……
BUKU BESAR UMUM
PERIODE……

Nama Akun: Penerimaan Pembayaran PBB dari WP Kode Rekening: 1110109

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	D/K	Saldo
	Piutang PBB WP	112	-	xxx	K	xxx

Tabel 2.13 Buku Besar Umum Untuk Penerimaan Pembayaran PBB dari Kecamatan

(Abdul Halim, 2004:50, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……
BUKU BESAR UMUM
PERIODE……

Nama Akun: Penerimaan Pembayaran PBB dari Kecamatan — Kode Rekening: 12102

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	D/K	Saldo
	Piutang	112	-	xxx	K	xxx

2.1.5.3.3 Jurnal Penyesuaian

Definisi jurnal penyesuaian menurut Kamus Besar Akuntansi (2004:35) yaitu: "Jurnal Penyesuaian adalah suatu ayat jurnal yang dibuat sebagai koreksi pada akhir periode akuntansi untuk mencatat perubahan-perubahan yang belum diakui atas aktiva, pasiva, pendapatan dan beban."

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk koreksi serta mencatat perubahan-perubahan yang belum diakui.

2.1.5.3.4 Laporan Keuangan

Definisi laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:201) dalam bukunya Teori Akuntansi menerangkan bahwa: "laporan keuangan adalah merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi". Menurut Kamus Besar Akuntansi (2004:418) menerangkan bahwa: "*financial statement* (laporan keuangan) adalah laporan-laporan keuangan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode tertentu".

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa laporan keuangan adalah laporan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Berikut adalah standar laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja menurut Abdul Halim dalam buku Akuntansi Sektor Publik adalah:

Tabel 2.14 Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja

(Abdul Halim, 2004:19, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah")

Pemerintah Kota/Kab
Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20..

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi
1	**PENDAPATAN DAERAH**		
2	**Pendapatan Asli Daerah**		
3	Pendapatan Pajak Daerah/Bagi Hasil PBB	xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
6	Pendapatan Lain-Lain yang Sah	xxx	xxx
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**	**xxx**	**xxx**
8	**PENDAPATA TRANSFER**		
9	**Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**		
10	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam/Bukan Pajak	xxx	xxx
12	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)**	**xxx**	**xxx**
15	**Transfer Pemedintah Pusat - Lainnya**		
16	Pendapatan Hibah	xxx	xxx
17	Dana Darurat	xxx	xxx
18	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	xxx	xxx
20	Bantuan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	xxx	xxx
21	**Jumlah Pendapatan Lainnya (16 s/d 20)**	**xxx**	**xxx**
22	**BELANJA**		
23	**Belanja Operasi**		
24	Belanja Pegawai	xxx	xxx
25	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx
26	Bunga	xxx	xxx
27	Subsidi	xxx	xxx
28	Bantuan	xxx	xxx
29	Sosial	xxx	xxx
30	Hibah	xxx	xxx
31	**Jumlah Belanja Operasi (24 s/d 30)**	**xxx**	**xxx**
32	**Belanja Modal**		
33	Belanja Tanah	xxx	xxx
34	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
35	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
36	Belanja Jalan, Irigasi dan lainnya	xxx	xxx
37	Belanja Aset Tetap dan Lainnya	xxx	xxx
38	**Jumlah Belanja Modal (33 s/d 37)**	**xxx**	**xxx**
39	**TRANSFER**		
40	**Transfer Bagi Hasil Ke Desa**		
41	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
42	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
43	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
44	**Jumlah Transfer Bagi/Hasil ke Desa (41 s/d 43)**	**xxx**	**xxx**
45	**SURPLUS/DEFISIT (7+14+21+31+38-44)**	**xxx**	**xxx**

Tabel 2.15 Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Lanjutan

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi
46	**PEMBIAYAAN**		
47	**Penerimaan Pembiayaan**		
48	Penggunaan SILPA	xxx	xxx
49	Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	xxx	xxx
50	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
51	Penjualan Investasi Lainnya	xxx	xxx
52	Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx
53	Pinjaman dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx
54	Pinjaman dari Pemerintah daerah Lainnya	xxx	xxx
55	Pinjaman dari BUMN/BUMD	xxx	xxx
56	Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan	xxx	xxx
57	Pencairan dana Cadangan	xxx	xxx
58	**Jumlah Penerimaan (48 s/d 57)**	**xxx**	**xxx**
59	**Pengeluara Pembiayaan**		
60	Pemberian Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
61	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Otonomi Lainnya	xxx	xxx
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMN/BUMD	xxx	xxx
65	Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri Lainnya	xxx	xxx
66	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
67	Pembentukan dana Cadangan	xxx	xxx
68	**Jumlah Pengeluaran (60 s/d 67)**	**xxx**	**xxx**
69	**Pembiayaan Netto (58-68)**	**xxx**	**xxx**
70	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (45-69)**		**xxx**

2.1.6 Sistem Akuntansi

Definisi sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi adalah: "sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu serta laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi"

Menurut George H. Bodnan (2000:255) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntasi Sistem Akuntansi adalah:

> "Sistem Akuntansi adalah metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis, mengidentifikasikan mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan untuk menjaga pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen.

2.1.7 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar Susanto (2004:124) dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen definisi sistem informasi akuntansi yaitu: "sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan."

Menurut Robert G. Murdick (2004:17) yang diterjemahkan oleh Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi adalah sebagai berikut: "sistem informasi akuntansi adalah kumpulan kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer."

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer.

2.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.1.8.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 menjelaskan bahwa:

> "Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi atau tanah dan bangunan, keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:273) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menyebutkan bahwa: "pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan".

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah iuran rakyat yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang memberikan manfaat.

2.1.8.2 Wajib Pajak

Wajib pajak atau Subjek pajak menurut Alimansyah dan Padji (2003:298) dalam bukunya yang berjudul Kamus Istilah Akuntansi menjelaskan bahwa: "wajib pajak (*tax payer*) adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan".

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil simpulan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan. Wajib pajak yang penulis bahas adalah semua warga yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan yang ada pada kecamatan cileunyi.

2.1.8.3 Objek Pajak

Objek pajak menurut Soemarso (2007:612) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menjelaskan bahwa: "objek pajak pajak bumi dan banguan adalah bumi dan/atau bangunan".

Objek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain.

Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain.

Adapun Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan menurut Erly Suandy (2002:351) dalam bukunya Perpajakan menyebutkan:

"a. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, da tanah Negara yang belum diberikan suatu hak.
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan".

2.1.8.4 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Menurut Alimansyah dan Padji (2003:240) dalam bukunya yang berjudul Kamus Istilah Akuntansi mengatakan bahwa: "nomor pokok wajib pajak atau NPWP (*tax payer identification number*) adalah nomor yang diberikan oleh kantor inspeksi pajak kepada orang atau badan pada saat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak". Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil simpulan bahwa NPWP

adalah nomor pokok yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal bahwa orang atau badan telah terdaftar sebagai wajib pajak.

2.1.8.5 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Erly Suandy (2002:361) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menjelaskan bahwa: "tarif pajak dikenakan atas objek pajak adalah 0,5% (lima persepuluh persen)". Sedangkan berdasarkan undang-undang pajak bumi dan bangunan no 12 tahun 1985 pasal 5 menyebutkan bahwa tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikenakan atas Objek Pajak bumi/bangunan adalah tarif tunggal yaitu sebesar 0,5%. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil simpulan bahwa tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan adalah 0,5%.

2.1.8.6 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak menurut Erly Suandy (2002:362) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menjelaskan bahwa: "NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak". Mulai 1 Januari 2001 NJOPTKP untuk setiap daerah ditetapkan setinggi-tingginya Rp.12.000.000,- untuk tiap wajib pajak (WP) apabila WP mempunyai lebih dari satu Objek Pajak maka yang mendapatkan NJOPTKP hanya satu objek, yaitu yang nilainya paling tinggi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil simpulan bahwa NJOPTKP yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar-besarnya Rp. 12.000.000,- untuk setiap wajib pajak. NJOPTKP yang ditetapkan pada kecamatan cileunyi sebesar Rp. 12.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

2.1.8.7 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak menurut Erly Suandy (2002:361) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menjelaskan bahwa: "NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti". Sedangkan menurut Soemarso (2007:615) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menjelaskan bahwa:

> "NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti, jika nilai NJOP < 1 Miliar adalah 20%, dan jika nilai NJOP ≥ 1 Miliar adalah 40%".

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil simpulan bahwa NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi yang terjadi secara wajar, namun apabila tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.

2.1.8.8 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 9 peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa:

> "Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat yang dibagikan kepada kabupaten/kota. 6,5% dibagikan secara merata keseluruh kabupaten/kota, 3,5% dibagika kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB melampaui rencana penerimaan. 90% untuk pemerintah daerah dengan rincian 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan, 63,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, dan 10% untuk biaya pemungut pajak"

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil simpulan bahwa bagi hasil pajak bumi dan bangunan untuk biaya pemungutan pajak adalah sebesar 10%

2.1.9 Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan definisi dari sistem informasi akuntansi pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau peraturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi untuk mengolah data yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai dengan mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilakukan oleh orang atau badan memungut dan melaporkan sekaligus menyetorkan PBB yang dipungutnya ke kas Negara yang berguna atau digunakan dalam mengambil suatu keputusan di dalam suatu organisasi atau instansi.

2.1.10 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.1.10.1 Fungsi-fungsi yang Terkait

Menurut Waluyo (2008:57) dalam bukunya Perpajakan Indonesia fungsi yang terkait dalam perhitungan PBB adalah sebagai berikut:"objek pajak yaitu bumi dan bangunan, tarif pajak untuk menentukan potongan PBB baik orang pribadi atau badan, nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)". Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa fungsi yang terkait dalam perancangan sistem informasi akuntansi pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah:

A. Wajib Pajak

B. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

C. Sub Bag. Keuangan

D. Camat

E. Sekretaris Camat

2.1.10.2 Formulir/Dokumen yang Digunakan

Menurut Waluyo (2008:76) dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyebutkan dokumen yang digunakan dalam melakukan perhitungan PBB adalah sebagai berikut: ”Data Wajib Pajak”.

Menurut Djoko Muljono (2006:17) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pajak mengatakan bahwa:

> “Formulir merupakan unsur pokok dalam sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk mencatat suatu transaksi pada saat terjadinya sehingga menjadi bukti tertulis dari transaksi yang terjadi seperti:
> - Surat Setoran Pajak
> - Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak.”

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil simpulan bahwa formulir yang digunakan dalam perancangan sistem informasi akuntansi pajak bumi dan bangunan adalah SSP (Surat Setoran Pajak), Formulir SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

2.1.10.3 Catatan Yang Digunakan

Menurut Waluyo (2008:89) dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyebutkan catatan akuntansi yang digunakan dalam perhitungan PBB adalah

sebagai berikut: ”1. Jurnal Umum. Digunakan untuk mencatat hasil dari perhitungan PBB”. Catatan yang digunakan dalam Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Jurnal Umum dan Buku Besar Umum.

2.1.10.4 Kebutuhan Rekayasa *Software* Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Definisi *software* menurut Azhar Susanto (2004:166) dalam buku Sistem Informasi Manajemen yaitu**:** “*Software* adalah kumpulan dari program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer”. Kebutuhan rekayasa *software* untuk SIA Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan kategorinya, yaitu:

A. Sistem Operasi *(operating system).*

   Definisi *Software* menurut Azhar Susanto (2004:166) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya menjelaskan bahwa: “*software* adalah kumpulan dari program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer”. Definisi sistem operasi menurut Azhar Susanto (2004:167) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya menjelaskan bahwa: “sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer”. Berdasakan sistem operasi (*operating system*) di atas kebutuhan *software* sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang yang sesuai dengan

perusahaan yang diteliti yaitu dengan menggunakan sistem operasi (*operating system*) windows XP, karena windows XP bias lebih mudah mengoprasikan program dan lebih men*suport* aplikasi apapun.

B. Bahasa Pemprograman *(Programming Languages*)

Definisi Microsoft Visual Basic menurut Adi Kurniadi (2000:4) dalam bukunya yang berjudul Pemograman Microsoft Visual Basic 6.0 adalah sebagai berikut: "Microsoft Visual Basic adalah bahasa pemograman komputer. Bahasa pemograman adalah perintah-perintah atau instruksi yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu". Definisi Microsoft Visual Basic 6.0 menurut Andi Sunyoto (2007:1) dalam buku Pemrograman Database dengan Visual Basic & Microsoft SQL yaitu: "Microsoft Visual Basic adalah program untuk membuat aplikasi berbasis Microsoft windows secara cepat dan mudah". Bahasa pemprograman *(Programming Languages*) yang dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi akuntansi pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah dengan menggunakan Microsoft visual basic 2000, karena memudahkan berbagi macam *database*, membuat laporan bulanan lebih mudah dan lebih cepat, mendukung akses internet, dan *user friendly* bagi penggunanya.

C. *Database*

Definisi SQL Server menurut Andi Sunyoto (2007:125) dalam bukunya yang berjudul Pemrograman Database dengan Visual Basic & Microsof SQL Server adalah sebagai berikut: "Microsoft SQL Server 2000 adalah salah satu produk andalan Microsoft untuk *database server*". *Database* yang mendukung program sistem informasi akuntansi pajak bumi dan bangunan

(PBB) adalah SQL Server, Merupakan *database* yang akan digunakan penulis dalam merancang sistem informasi akuntansi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Kantor Kecamatan Cileunyi Bandung, karena mampu membuat suatu *database* dengan banyak *file*, dan memiliki fasilitas *Query* untuk relasi antar tabel. *Database* yang dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi akuntansi pajak bumi dan bangunan (PBB) seperti tabel data wajib pajak, tabel njoptkp, tabel hasil perhitungan pajak, jurnal umum dan buku besar.

D. Crystal Report

Crystal Report merupakan *software output* yang dibutuhkan untuk merancang sistem informasi akuntansi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Kantor Kecamatan Cileunyi Bandung dalam pembuatan laporan, dan dapat lebih mudah dibuat oleh *user* tanpa perlu bahasa pemprograman, Crystal Report juga dapat mendesain laporan yang dihasilkan menjadi lebih menarik, dan laporan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan bulanan.

2.2 Bentuk, Jenis dan Bidang Perusahaan

A. Bentuk Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada perusahaan yang berbentuk instansi pemerintah yaitu Kantor Kecamatan Cileunyi.

B. Jenis Perusahan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada perusahaan yang berbentuk Jasa, yang mana definisi Perusahaan jasa menurut Soemarso SR

(2004:22) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Suatu Pengantar menjelaskan bahwa: "perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contoh dari perusahhan ini adalah kantor akuntan, pengacara, tukang cukur, dan lain lain"

Jenis Perusahaan yang diteliti oleh penulis adalah jenis perusahaan jasa (instansi pemerintah).

C. Bidang Perusahaan

Bidang instansi yang penulis teliti adalah instansi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan masyrakat.

2.3 Alat Kelengkapan Sistem

2.3.1 Diagram Konteks

Menurut Al-bahra bin ladjamudin (2005:64) dalam bukunya yang berjudul Anlisis dan Desain Sistem Informasi menjelaskan bahwa: "diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem". Definisi diagram konteks menurut Tata Sutabri (2004: 166) dalam bukunya yang berjudul Analisa Sistem Informasi menyatakan bahwa:

> "Diagram konteks dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau dengan kata lain diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum atau global dari keseluruhan sistem yang ada."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diagram konteks adalah gambaran perusahaan secara umum.

2.3.2 *Data Flow Diagram* (DFD)

Definisi diagram arus data menurut Al-Bahra bin ladjamudin (2005:64) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi adalah sebagai berikut: "diagram aliran data merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil". Menurut Jogiyanto HM (2005:700) dalam bukunya Analisis dan Desain Sistem Informasi menjelaskan bahwa:

> "Diagram arus data adalah diagram yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan."

Definisi *data flow diagram* menurut Hartono (2005:700) dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

> *"Data flow Diagram* digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan. *Data Flow Diagram* juga digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur."

Definisi *Data Flow Diagram* menurut Krismiaji (2005:68) dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut: "*data flow diagram* digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru". Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diagram arus data merupakan sebuah model dari sistem untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika.

Menurut Tata Sutabri (2004:166) dalam buku yang berjudul Analisa Sistem Informasi langkah-langkah di dalam membuat *data flow diagram* dibagi menjadi 3 tahap atau tingkat konstruksi DFD, yaitu sebagai berikut:

" a. Diagram Konteks
Diagram ini dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau dengan kata lain diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum/global dari keseluruhan sistem yang ada.

b. Diagram Nol (0)
Diagram ini dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang ada di dalam diagram konteks, yang penjabarannya lebih terperinci.

c. *Data Flow Diagram* Detail
Diagram ini dibuat untuk menggambarkan arus data secara lebih mendetail lagi dari tahapan proses yang ada di dalam diagram nol."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diagram arus data adalah gambaran sistem yang sudah ada atau sistem baru yang akan dibuat.

2.3.3 Kamus Data

Definisi kamus data menurut Jogiyanto HM (2005:725) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi adalah sebagai berikut: "kamus data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi". Menurut Tata Sutabri (2003:170) dalam bukunya Analisa Sistem Informasi menjelaskan bahwa: "kamus data merupakan katalog fakta, tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi".

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kamus data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Menurut Tata Sutabri (2004:170) dalam buku Analisa Sistem Informasi

kamus data harus dapat mencerminkan keterangan yang jelas tentang data yang dicatatnya sehingga kamus data harus memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Arus data
B. Nama arus data
C. Struktur data
D. Alias
E. Bentuk Data
F. Penjelasan

2.3.4 Bagan Alir (*Flowchart*)

Bagan alir menurut Jogiyanto HM (2005:795) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi adalah sebagai berikut: "bagan alir (*flowchart*) adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika". Definisi bagan alir menurut Al-bahra (2005:263) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi menyebutkan bahwa: "bagan alir (*flowchart*) bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah". Definisi bagan alir menurut Krismiaji (2005:71) dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi menyebutkan bahwa:

> "Bagan Alir (*Flowchart*) adalah merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek secara jelas, tepat, dan logis bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem."

Definisi bagan alir menurut James Hall (2007:83) yang diterjemahkan oleh Dewi Fitria Sari dan Deni Arnos Kwary dalam buku yang berjudul *Accounting*

Information System menyebutkan bahwa: ”bagan alir *(flowchart)* merupakan representasi grafikal dari sebuah sistem yang menjelaskan relasi fisik diantara entitas-entitas kuncinya”. Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *flowchart* berfungsi bagan yang mempunyai arus mengambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah.

A. Bagan Alir Dokumen (*Document Flowchart*)

Definisi bagan alir dokumen menurut Krismiaji (2005:75) dalam buku Sistem Informasi Akuntansi menyebutkan bahwa:

> “Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban didalam sebuah organisasi. Bagan alir ini menelusuri sebuah dokumen dari asalnya sampai dengan tujuannya. Tujuan digunakan dokumen tesebut, kapan tidak dipakai lagi dan hal–hal lain yang terjadi ketika dokumen tesebut mengalir melalui sebuah sistem.”

Definisi bagan alir dokumen menurut James Hall (2007:75) yang diterjemahkan oleh Dewi Fitria Sari dan Deni Arnos Kwary dalam buku yang berjudul *Accounting Information System* menyebutkan bahwa:

> ”Sebuah *flowchart* dokumen digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen dari sebuah sistem manual, termasuk *record-record* akuntansi (dokumen, jurnal, buku besar, dan *file*), departemen organisasional yang terlibat dalam proses, dan kegiatan-kegiatan (baik klerikal maupun fisikal) yang dilakukan dalam departemen tersebut.”

Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menarik simpulan bahwa bagan alir dokumen adalah suatu bagan yang menunjukan aliran dokumen dari asalnya sampai dengan tujuannya.

B. Bagan Alir Sistem (*System Flowchart*)

Definisi bagan alir sistem menurut Krismiaji (2005:75) dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi menyebutkan bahwa:

> "Bagan alir *sistem* menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan dan output sebuah *sistem* informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini dimulai dengan identifikasi input yang masuk ke dalam sistem dan sumbernya. Bagan alir *sistem* merupakan salah satu alat penting untuk menganalisa, mendesain dan mengevaluasi sebuah sistem."

Definisi bagan alir sistem menurut James Hall yang diterjemahkan oleh Dewi Fitria Sari dan Deni Arnos Kwary (2009:83) dalam buku yang berjudul *Accounting Information System* menyebutkan bahwa: "*flowchart* sistem merupakan pemotretan aspek-aspek komputer dalam sebuah sistem". Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bagan alir adalah bagan yang menunjukan alir program secara logika.

2.3.5 Normalisasi

Definisi Normalisasi menurut Al-Bahra (2005:169) dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi menjelaskan bahwa: "normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional, dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika". Teori normalisasi dibangun menurut konsep *level* normalisasi. *Level* normalisasi atau sering disebut bentuk normal suatu relasi dijelaskan berdasarkan kriteria tertentu pada bentuk normal. Bentuk normal yang dikenal hingga saat ini meliputi bentuk UNF, INF, 2NF, 3NF,dan BCNF. Menurut Al-Bahra (2005:168) dalam buku yang berjudul "Analisis dan Desain Sistem Informasi" secara berturut masing-masing *level* normal tersebut akan dijelaskankan seperti di bawah ini:

"A. Bentuk Tidak Normal (*Un Normalized Form*/UNF)

Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan dikerekam, tidak ada keharusan mengikuti format tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan saat menginput.

B. Bentuk Normal Kesatu (*First Normal Form*/1 NF)

Pada tahap ini dilakukan penghilangan beberapa group elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi diantara setiap baris pada suatu tabel, dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang *atomic* (bersifat *atomic value*). Atom adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya, bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya.

Syarat normal kesatu (1-NF) yaitu:

1. Setiap data dibentuk dalam *flat file,* data dibentuk dalam satu *record* demi satu *record* nilai dari *field* berupa "*atomic value"*.
2. Tidak ada *set atribute* yang berulang atau bernilai ganda.
3. Telah ditentukannya *primary key* untuk tabel/relasi tersebut.
4. Tiap artibut hanya memiliki satu pengertian.

C. Bentuk Normal Kedua (*Second Normal Form*/2 NF)

Bentuk Normal kedua didasari atas konsep *full functional dependency* (ketergantungan fungsional sepenuhnya).

Syarat normal kedua (2-NF):

1. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kesatu.
2. Atribut bukan kunci (*Non-Key*) harus memiliki ketergantung fungsional sepenuhnya *(fully functional dependency*) pada kunci utama/*primary key*.

D. Bentuk Normal Ketiga (*Third Normal Form*/3 NF)

Syarat normal ketiga (*Third Normal Form*/3 NF)

1. Bentuk data telah memenuhi data kedua.
2. Artibut bukan kunci (*non-key*) haruslah tidak memiliki ketergantungan fungsional (*funcitional dependency*) terhadap artibut bukan kunci lainnya, seluruh artibut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap *primary key* direlasi itu saja.

E. *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF)

Boyce-Codd Normal Form (BCNF) didasari pada beberapa ketergantungan fungsional (*functional dependencies*) dalam suatu relasi yang melibatkan seluruh *candidate key,* maka hasil uji normalisasi sampai ke bentuk normal ketiga sudah identik dengan *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF).

Syarat *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF) yaitu:

1. Jika dan hanya setiap detirminan adalah satu *candidate key.*
2. *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF) tidak mengharuskan suatu relasi harus sudah dalam bentuk normal ketiga (3-NF), baru bisa dibuatkan kedalam *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF)."

Definisi Normalisasi menurut Tata Sutabri (2004:202) dalam buku yang berjudul Analisis Sistem Informasi adalah sebagai berikut: ”normalisasi merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukan entitas dan relasinya”. Berdasarkan definisi normalisasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa normalisasi adalah pengelompokan atribut dari suatu relasi.

2.3.6 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Definisi *Entity Relationship Diargam* (ERD) menurut Al-Bahra (2005:142) dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi adalah sebagai berikut: “*entity relationship diagram* (ERD) adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak”. Definisi *Entity Relationship Diagram* (ERD) menurut Fathansyah (2004:79) dalam buku yang berjudul Basis Data adalah sebagai berikut:

> “Model *Entity-Relationship* yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau, dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD).“

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diagram relasi entitas adalah model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan secara abstrak.

A. Derajat Relationship (*Relationship Degree*)

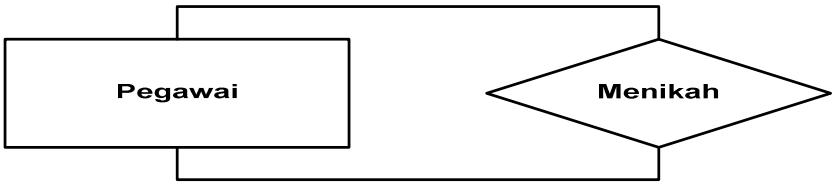
Definisi Derajat relationship menurut AL-Bahra (2005:144) dalam buku yang berjudul Konsep Sistem Basis Data dan Implementasinya menyatakan bahwa:

"*relationship degree* atau derajat *relationship* adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu *relationship*". Derajat *Relationship* yang sering dipakai di dalam ERD sebagai berikut:

1. *Unary Relationship*

   Unary Relationship adalah model *relationship* yang terjadi antara *entity* yang berasal dari *entity set* yang sama. Model ini juga sering disebut sebagai *Recursive Relationship* atau *Reflective Relationship*.

   Contoh:



Gambar 2.3 Diagram *Relationship Unary*

2. *Binary Relationship*

   Binary Relationship adalah model *relationship* antara *instance-instance* dari suatu tipe entitas (dua *entity* yang berasal dari *entity* yang sama). *Relationship* ini paling umum digunakan dalam pembuatan model data.

   Contoh:

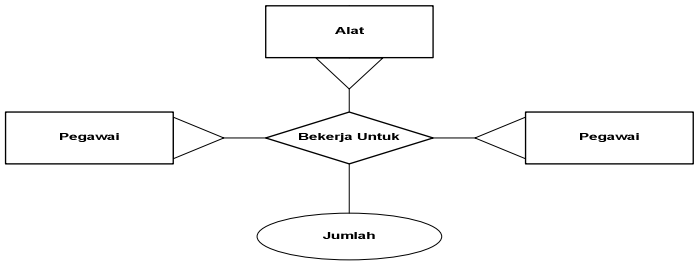


Gambar 2.4 Diagram *Relationship Binary*

3. *Ternary Relationship*

Ternary Relationship merupakan *relationship* antara *instance-instance* dari tiga tipe entitas secara serentak.

Contoh:



Gambar 2.5 Diagram *Ternary Relationship*

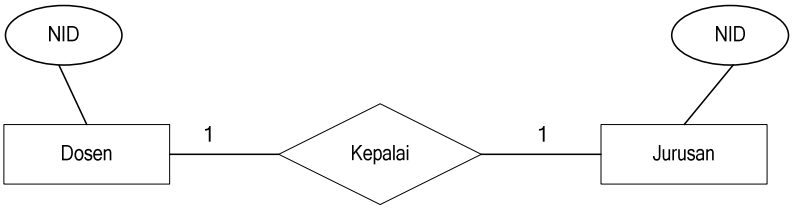
B. Kardinalitas Relasi

Definisi kardinalitas relasi menurut Al-Bahra (2005:147) dalam buku yang berjudul Konsep Sistem Basis Data dan Implementasinya adalah sebagai berikut: "Kardinalitas Relasi menunjukkan jumlah maksimum *tupel* yang dapat berelasi dengan entitas pada entitas yang lain". Terdapat 3 macam kardinalitas relasi yaitu sebagai berikut:

1. Relasi Satu ke satu (*One to One*)

Tingkat hubungan ini menunjukkan hubungan satu ke satu, dinyatakan dengan satu kejadian pada entitas pertama, dan hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang kedua dan sebaliknya.

Contoh:

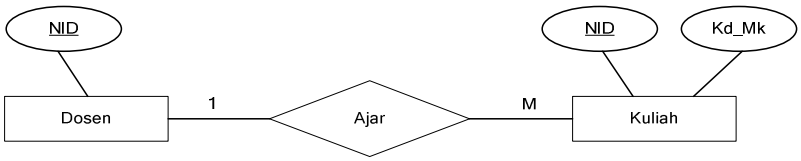


Gambar 2.6 *One to One*

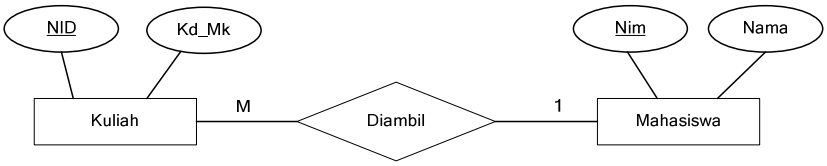
2. Relasi Satu ke Banyak atau Banyak ke Satu (*One to Many* atau *Many to One*)

   Tingkat hubungan satu ke banyak adalah sama dengan banyak ke satu, tergantung dari arah mana hubungan tersebut dilihat. Untuk satu kejadian pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas yang kedua. Sebaliknya, satu kejadian pada entitas yang kedua hanya dapat mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang pertama.

   Contoh:



Gambar 2.7 ***One to Many***

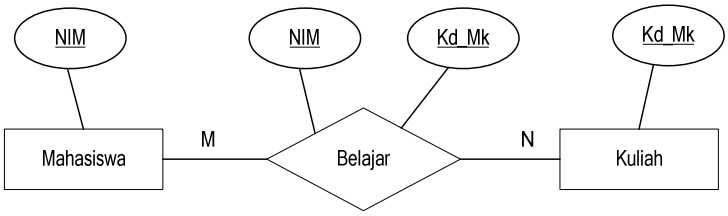


Gambar 2.8 ***Many to One***

3. Relasi Banyak-ke-Banyak *(Many to Many)*

   Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika tiap kejadian pada sebuah entitas akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya, dilihat dari sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi yang kedua.

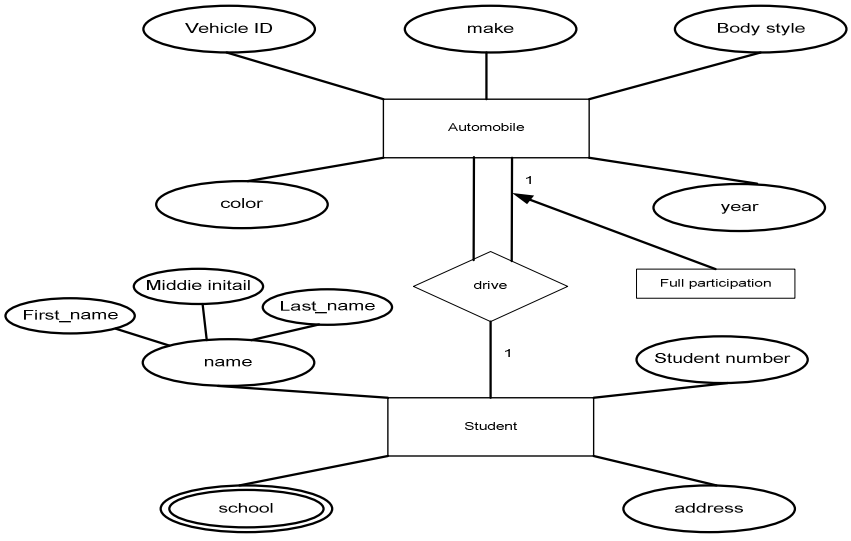
Contoh:



Gambar 2.9 ***Many to Many***

Menurut Earp Bagul Partisipasi (*Participation*) (2003:77) dalam bukunya yang berjudul *Data Design Using Entity Relationship Diagram,* membagi *participation* menjadi dua yaitu sebagai berikut:

"A. *Full Participation is the double line. Some designers prefer to call this participation mandatory. The point is that is that if part of a relationship is mandatory or full, you cannot have a null value (a missing value) for that attribute in relationship*.
B. *Part Participation is the single line, is also called optional. The sense of partial, optional participation is that there could be student who don't have a relationship to automobile*."



Gambar 2.10 ***Full Participation*** **dan** ***Part Participation***

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *full participation* dilambangkan dengan dua garis diantara belah ketupat yang berarti pasti, yaitu sepeda pasti akan dikendarai oleh siswa tetapi tidak setiap siswa mengendarai sepeda. Sedangkan *part participation* dilambangkan dengan satu garis diantara belah ketupat, yaitu untuk mengidikasikan bahwa para sisawa tidak pasti berpatisipasi pada relasi *drive* karena mereka tidak diperbolehkan mengendarai mobil ke kampus.

C. Key

Menurut Al-Bahra (2005:138) dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desaian Sistem Informasi menjelaskan bahwa *key* adalah: "*key* adalah elemen *record* yang dipakai untuk menemukan *record* tersebut pada waktu akses, atau bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi setiap entity/*record*/baris". Jenis-Jenis *Key* antara lain:

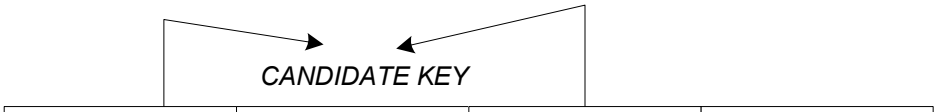
1. Superkey

Superkey merupakan satu atau lebih atribut (kumpulan atribut) dari suatu tabel yang dapat digunkan untuk mengidentifikasi *entity/record* dari tabel tersebut secara unik.(tidak semua atribut dapat menjadi *superkey*).

2. Candidate Key

Superkey dengan jumlah atribut minimal, disebut dengan *candidate key. Candidate key* tidak boleh berisi atribut dari tabel yang lain, sehingga *candidate key* sudah pasti *superkey*, namun belum tentu sebaliknya.

Contoh:



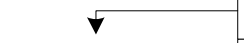
NIM	NAMA	NO.KWITANSI	JUMLAH
987456	INDRA	111	1000
654789	RONY	222	2000
654123	JAJANG	333	3000
321456	BURHAN	444	4000

Gambar 2.11 *Candidate Key*

3. *Primary Key*

Salah satu atribut dari *candidate key* dapat dipilih/ditentukan menjadi *primary key* dengan tiga kriteria yaitu *key* tersebut lebih natural untuk digunakan sebagai acuan, *key* tersebut lebih sederhana dan *key* tersebut terjamin keunikannya.

Contoh:

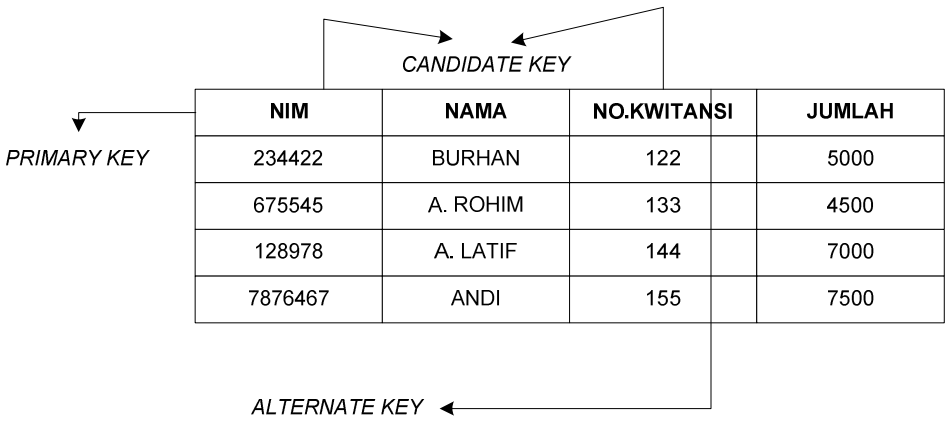


NIM	NAMA	UMUR
12345	BAMBANG	20
54321	RINDU	19
67899	ENENG	19
99876	UJANG	21
456123	DADANG	22

Gambar 2.12 *Primary Key*

4. Alternate Key

Setiap atribut dari *candidate key* yang tidak terpilih menjadi *primary key*, maka atribut-atribut tersebut dinamakan *alternate key*. Contoh:

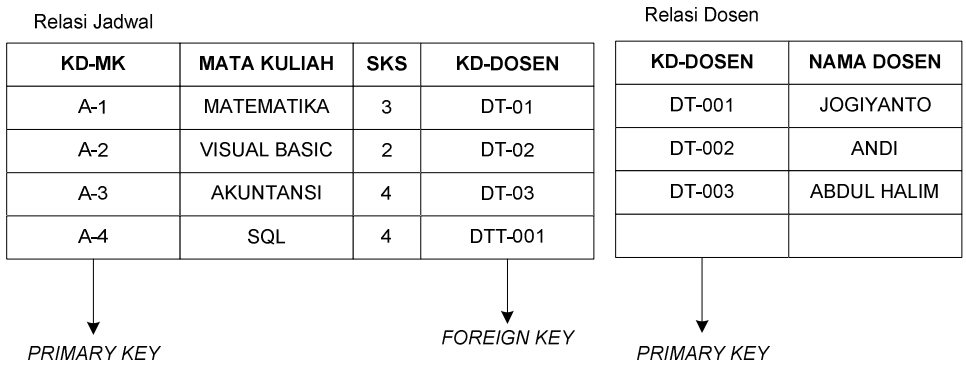


Gambar 2.13 ***Alternate Key***

5. Foreign Key

Foreign Key merupakan sembarang atribut yang menunjuk kepada *primary key* pada tabel yang lain. *Foreign key* akan terjadi pada suatu relasi yang memiliki kardinalitas *one to many* (satu ke banyak) atau *many to many* (banyak ke banyak). *Foreign key* biasanya selalu diletakkan pada tabel/relasi yang mengarah ke banyak.

Contoh:



Gambar 2.14 ***Foreign Key***

2.4 *Software*

Perangkat lunak (*Software*) adalah komponen data *processing* yang berupa program-program dan teknik-teknik lainnya untuk mengontrol sistem komputer.

Software dapat dikatagorikan ke dalam 3 bagian, yaitu:

A. Perangkat lunak sistem operasi *(operating system).*

B. Perangkat lunak bahasa *(language software).*

C. Perangkat lunak Aplikasi *(application software).*

Definisi *Software* menurut Azhar Susanto (2004:166) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya menjelaskan bahwa: "*software* adalah kumpulan dari program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer". Definisi *software* (perangkat lunak) menurut Daulay (2007:22) dalam buku yang berjudul Mengenal *Hardware-Software* dan Pengelolaan Instalasi Komputer sebagai berikut: "perangkat lunak berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada *system computer*."

Definisi *Software* menurut Azhar Susanto (2004:234) dalam buku Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Pengembangannya mendefinisikan *software* sebagai berikut: "*software* adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer". Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *software* adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer.

2.4.1 *Operating System Software*

Definisi *software* sistem operasi menurut Daulay (2007:22) dalam buku yang berjudul Mengenal *Hardware-Software dan* Pengelolaan Instalasi Komputer menyebutkan bahwa: ”*operating system software* merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengkonfigurasi komputer agar dapat menerima berbagai perintah dasar yang diberikan sebagai masukan”. Sedangkan definisi Microsoft Windows XP menurut Abdul Razaq (2004:2) dalam buku yang berjudul Penuntun Praktis Microsoft Office XP adalah sebagai berikut: “Microsoft Windows XP merupakan sistem operasi berbasis *grafis* (gambar) dengan berbagai fasilitas, khususnya dalam berintegrasi dengan internet serta dengan kemudahan dalam pengoperasiannya.”

Microsoft Windows XP ini merupakan salah satu produk unggulan dari Microsoft Corporation yang secara resmi dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2001. Microsoft Windows XP selanjutnya disingkat menjadi Windows XP ini merupakan kelanjutan dari Windows versi sebelumnya dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Microsoft Windows XP adalah sistem operasi yang dilengkapi berbagai fasilitas serta mudah dalam pengoperasiannya dan gampang dimengerti.

2.4.2 *Enterpreter Software*

Definisi *Enterpreter Software* menurut Hartono (2000:394) dalam buku yang berjudul Pengenalan Komputer menjelaskan bahwa: ”*enterpreter software* adalah menerjemahkan instruksi per instruksi dan langsung dikerjakan, sehingga *source* program tidak harus ditulis secara lengkap terlebih dahulu”.

A. *Hardware*

Definisi *Hardware* menurut Azhar Susanto (2004:139) dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya adalah sebagai berikut: "*hardware* adalah merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan data mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi".

1. Bagian Input (*Input Device*)

   Merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk memasukan data ke dalam komputer.

2. Bagain Pengolahan Utama dalam memori

   Merupakan bagian untuk mengolah data dan memproses data sehingga menjadi informasi.

3. Bagian Output (*Output Device*)

   Merupakan Peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data.

B. *Software*

Definisi *Software* menurut Azhar Susanto (2004:165) dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya adalah sebagai berikut: "*software* merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer."

C. *Brainware*

Definisi *Brainware* menurut Azhar Susanto (2004:187) dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya adalah sebagai berikut: "*brainware* atau sumber daya manusia (SDM) merupakan

bagian terpenting dari komponen sistem informasi (SI) dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi manajemen".

Berdasarkan Penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *hardware* merupakan perangkat keras untuk menginput, memprosas, dan output data menjadi informasi. *Software* merupakan system oprasi yang bekerja untuk mengolah data menjadi informasi, sedangkan *brainware* merupakan *user* atau orang yang menjalankan sistem operasi dan yang mengolah data menjadi informasi.

2.4.3 *Compiler Software*

Definisi *Compiler* menurut Azhar Susanto (2004:173) dalam buku Sistem Informasi manajemen Konsep dan Pengembengannya menjelaskan bahwa: "*compiler* berfungsi untuk menterjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung satu file". Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diambil simpulan bahwa *software compiler* memiliki fungsi yang hampir sama dengan *software interpriter* yaitu sebagai penterjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia juga oleh komputer.

Definisi Microsoft Visual Basic menurut Adi Kurniadi (2000:4) dalam bukunya yang berjudul Pemograman Microsoft Visual Basic 6.0 adalah sebagai berikut: "Microsoft Visual Basic adalah bahasa pemograman komputer. Bahasa pemograman adalah perintah-perintah atau instruksi yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu". Definisi Microsoft Visual Basic 6.0 menurut Andi Sunyoto (2007:1) dalam buku Pemrograman Database dengan

Visual Basic & Microsoft SQL yaitu: “Microsoft Visual Basic adalah program untuk membuat aplikasi berbasis Microsoft windows secara cepat dan mudah.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diambil simpulan bahwa Microsoft Visual Basic 6.0 merupakan salah satu *software* yang memiliki fungsi sebagai pembuat aplikasi pada Microsoft windows.

2.4.4 *Application Software*

Definisi aplikasi menurut Azhar Susanto (2004:174) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya menjelaskan bahwa: ”aplikasi merupakan *software-software* yang siap pakai”. Berdasarkan definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *software* aplikasi merupakan program-program yang sudah siap untuk dipakai. *Software* aplikasi yang digunakan penulis adalah Microsoft SQL Server 2000 dan Crystal Report. Maka definisi SQL Server menurut Andi Sunyoto (2007:125) dalam bukunya yang berjudul Pemrograman Database dengan Visual Basic & Microsof SQL Server adalah sebagai berikut: “Microsoft SQL Server 2000 adalah salah satu produk andalan Microsoft untuk database server.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diambil simpulan bahwa SQL Server merupakan *software* buatan Microsoft yang berfungsi sebagai pembuat database. Sedangkan definisi Crystal Report menurut Madcom (2003:40) dalam bukunya yang berjudul Visual Basic 6.0 dengan Crystal Report adalah sebagai berikut: “Crystal Report merupakan program khusus untuk membuat laporan yang terpisah dengan program Microsoft Visual Basic 6.0, tapi keduanya dapat dihubungkan (di link-kan)”. Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa crystal

report merupakan salah satu *software* yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam laporan.

2.4.4.1 Microsoft SQL Server

Untuk *application software* penulis memilih SQL Server 2000 karena mempunyai fungsi dalam pembuatan satu *database* dengan banyak *file* data. Definisi SQL Server menurut Kusrini (2007:145) dalam buku yang berjudul Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic & SQL Server mendefinisikan SQL Server sebagai berikut: "SQL Server adalah perangkat lunak *relation database management system* (RDBMS) yang di desain untuk melakukan proses manipulasi *database* berukuran besar dengan berbagai fasilitas". Definisi SQL Server menurut Feri Djuandi (2002:3) dalam buku yang berjudul SQL Server Untuk Profesional mendefinisikan SQL Server sebagai berikut: "SQL Server adalah sebuah sistem arsitektur terbuka yang memungkinkan para pengembang program memperluas dan menambahkan fungsi-fungsi ke dalam *database* tersebut".

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Microsoft SQL server merupakan program aplikasi yang mempunyai kemampuan dalam pembuatan satu *database* dengan banyak *file* data dan bisa bekerja dengan bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh *programmer* dalam pembuatan *software*.

2.4.4.2 Crystal Report

Crystal Report menurut Kusrini (2007:264) dalam buku yang berjudul Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic & SQL Server mendefinisikan Crystal Report sebagai berikut: "Crystal Report merupakan program yang dapat digunakan untuk membuat, menganalisis dan menterjemahkan informasi yang terkandung dalam *database* atau program ke dalam berbagai jenis laporan yang sangat *fleksibel*". Crystal report menurut Madcoms (2003:40) dalam buku yang berjudul Program Aplikasi Terintegrasi *Inventory* Hutang dan Piutang dengan Visual Basic 6.0 Dan Crystal Report menyebutkan bahwa: "Crystal report merupakan program khusus untuk membuat laporan yang terpisah dari program Microsoft Visual Basic 6.0, tetapi keduanya dapat dihubungkan (*linkage*) ". Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menimpulkan bahwa Crystal Report merupakan *software* yang mempunyai kemampuan dalam pembuatan laporan.